

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DI KECAMATAN TANJUNG TEBAT  
KABUPATEN LAHAT  
(Studi pada Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama,  
dan Desa Pandan Arang Ilir)**

**SKRIPSI**



**Nama : Nanda Radufi**

**Nim : 222014038**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DI KECAMATAN TANJUNG TEBAT  
KABUPATEN LAHAT  
(Studi pada Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama,  
dan Desa Pandan Arang Ilir)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Nanda Radufi**

**Nim : 222014038**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Radufi  
NIM : 222014038  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Studi pada Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, Dan Desa Pandan Arang Ilir

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2019



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa  
Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan  
Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Studi pada Desa  
Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, dan Pandan  
Arang Ilir)  
Nama : Nanda Radufi  
Nim : 22 2014 038  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan

Pada tanggal,

Pembimbing I

**(Betri, S.E., Ak., M.Si., CA)**  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II

**(Lis Djuniar, S.E., M.Si)**  
NIDN/NBM : 0220067101/1115716

Mengetahui,

Dekan

U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**(Betri, S.E., Ak., M.Si., CA)**  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *Motto*

*Dari Abu Hurairah R.a katanya Rasulullah saw bersabda hindarilah prasangka, karena prasangka itu berita paling bohong. Jangan saling mencari keburukan orang. Jangan saling mengorek rahasia orang lain dan saling menyaingi jangan saling mendengki, jangan saling marah dan jangan saling acuh, tetapi jadilah kamu semua bersaudara sebagai hamba-hamba Allah (Hadis Riwayat Muslim).*

*Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:*

- ❖ Ayah (Hefni) dan ibu (Leni Marlina)  
tercinta*
- ❖ Saudariku*
- ❖ Keluargaku*
- ❖ Almamaterku*

## **ABSTRAK**

Nanda Radufi/222014038/Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Studi pada Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, dan Desa Pandan Arang Ilir

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama dan Desa Pandan Arang Ilir Kecamatan Tanjung Tebat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang kompeten dalam pengelolaan ADD di Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, Dan Desa Pandan Arang Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, dan Desa Pandan Arang Ilir belum sepenuhnya transparan dan sudah akuntabel pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan pada tahap perencanaan masih ada yang belum terealisasi di bidang pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD)**

*Abstrack*

*Nanda Radufi / 222014038 / 2019 /An Analysis of Transparency and Accountability of Village Government in Managing Village Fund Allocation in Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (The Study in Tanjung Menang Village, Air Dingin Lama Village, and Pandan Arang Ilir Village)*

*This study aimed to describe an analysis of transparency and accountability of village government in the management of Village Fund Allocation in Tanjung Menang Village, Air Dingin Lama Village, and Pandan Arang Ilir Village. The method used descriptive qualitative research method and using research data techniques with observation, interviews, and documentation. The samples in this study were village officials who were competent in the management of ADD in Tanjung Menang Village, Air Dingin Lama Village, and Pandan Arang Ilir Village, Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat. The results of this study indicated that the government of Tanjung Menang Village, Air Dingin Lama Village, and Pandan Arang Ilir Village had not been fully transparent and accountable at the stage of implementation, administration, reporting, and accountability. While at the planning stage there were still those that had not been realized in the field of community empowerment.*

*Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Allocation (ADD)*

PENGESAHAN

NO. 415/Abstract/LB/UMP/VIII/2019

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-nya sehingga penulis bisa menulis skripsi dengan judul "**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Studi pada Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, dan Desa Pandan Arang Ilir**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada sesosok nabi dan rosul yang teramat di cintai umatnya dan sangat mencintai umatnya beliau adalah sayyidina wasafiina wamaulana Muhammad SAW

Pada kesempatan ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya yang tak lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Berkat bantuan dukungan dan dorongan baik berupa petunjuk, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak maka akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku Ayahanda (Hefni), Ibunda (Leni Marlina), Kakek (Karni), Nenek (Mini), Saudariku (Dina Melanda) dan seluruh keluarga besar serta saudara seperjuangan saya yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendoakan,

memberikan motivasi dan inspirasi serta dukungan agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga menulis skripsi ini dapat diselesaikan

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbing saya Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE.,Ak.,M.Si.,CA. dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si. Selaku ketua Program dan Wakil Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si. Selaku Pembimbing Akademik paket 11 Angkatan 2014
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak kepala desa beserta perangkat dan masyarakat desa Tanjung Menang, desa Air Dingin Lama, dan Desa Pandan Arang Ilir Kecamatan Tanjung Tebat yang telah membantu untuk menjadi responden dalam penelitian.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., membalas budi baik kalian dengan berkah yang melimpah. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhirul kalam, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan disisi Allah SWT

**Wassalamualaikum, Wr.Wb**

Palembang, 2019

Penulis,

Nanda Radufi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DEPAN/COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAAN DAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masal.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	11
1. Transparansi .....	11
a. Pengertian Transparansi .....	11
b. Karakteristik Transparansi .....	13
2. Akuntabilitas .....	14
a. Pengertian Akuntabilitas .....	14
b. Macam-macam Akuntabilitas .....	15
c. Indikator Akuntabilitas .....	16
3. Dana Desa .....	18
a. Kedudukan dan Fungsi Dana Desa .....	18
b. Tim Pengelola Dana Desa .....	19
4. Pengelolaan Dana Desa .....	21
a. Perencanaan .....	22
b. Pelaksanaan .....	22
c. Penatausahaan .....	22
d. Pelaporan .....	23
e. Penanggungjawaban .....	24
B. Penelitian Sebelumnya .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi penelitian .....	30
C. Operasional Variabel .....	30

D. Data Yang Diperlukan .....	30
E. Metode Pengumpulan Data .....	31
F. Analisis dan Tehnik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Teba.....	35
a. Desa Tanjung Menang .....	35
b. Desa Air Dingin Lama .....	41
c. Desa Pandan Arang Ilir .....	45
B. Pembahasan .....	49
1. Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	50
a. Informatif .....	52
b. Keterbukaan .....	52
c. Pengungkapan .....	53
2. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	53
a. Tahap Perencanaan .....	54
b. Tahap Pelaksanaan .....	62
c. Tahap Penatausahaan .....	64
d. Tahap Pelaporan .....	67
e. Tahap Pertanggungjawaban .....	70
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>I.1</b>	<b>Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat</b>
<b>II.1</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya</b>
<b>III.1</b>	<b>Operasionalisasi Variabel</b>
<b>IV.1</b>	<b>Mata Pencarian Desa Tanjung Menang</b>
<b>IV.2</b>	<b>Pendapatan dan Realisasi Alokasi Dana Desa</b>
<b>IV.3</b>	<b>Kesimpulan Wawancara</b>
<b>IV.4</b>	<b>Kesimpulan Wawancara</b>
<b>IV.5</b>	<b>Daftar Rencana Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Menang</b>
<b>IV.6</b>	<b>Daftar Rencana Alokasi Dana Desa di Desa Air Dingin Lama</b>
<b>IV.7</b>	<b>Daftar Rencana Alokasi Dana Desa di Desa Pandan Arang Ilir</b>
<b>IV.8</b>	<b>Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Menang</b>
<b>IV.9</b>	<b>Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Air Dingin Lama</b>
<b>IV.10</b>	<b>Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandan Arang Ilir</b>
<b>IV.11</b>	<b>Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Menang</b>
<b>IV.12</b>	<b>Indikator Kesesuaian Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Menang</b>
<b>IV.13</b>	<b>Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Air Dingin Lama</b>
<b>IV.14</b>	<b>Indikator Kesesuaian Alokasi Dana Desa di Desa Air Dingin Lama</b>
<b>IV.15</b>	<b>Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Pandan Arang Ilir</b>
<b>IV.16</b>	<b>Indikator Kesesuaian Alokasi Dana Desa di Desa Pandan Arang Ilir</b>
<b>IV.17</b>	<b>Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

- IV.1 Struktur Organisasi Desa Tanjung Menang**
- IV.2 Struktur Organisasi Desa Air Dingin Lama**
- IV.3 Struktur Organisasi Desa Pandan Arang Ilir**
- IV.4 Alur Perencanaan Dana Desa**
- IV.5 Proses Perencanaan Permendes**
- IV.6 Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggung jawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Kini

desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Pada masa orde baru ini terdapat perubahan sistem pada pemerintah pusat yang mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya, atau sering kita sebut dengan sistem Desentralisasi. Perubahan paradigma ini diawali dengan dikeluarkannya paket kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004. Isi pokok dari paket Undang-undang ini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melakukan penataan kelembagaan dan personil serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan fiskal secara otonom.

Pada sistem ini, secara tidak langsung terdapat kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dan memberikan kesadaran bahwa pemberdayaan potensi lokal sebagai kemandirian daerah sangatlah penting. Pemberdayaan ini bertujuan untuk membentuk kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, daya pikir, serta tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Paket Undang-undang tersebut membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan tata keuangan, sekaligus

membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran keuangan Daerah. Pemerintah Daerah akan bekerja mulai dari perumusan anggaran hingga perealisasi anggaran tersebut, tentunya diharapkan akan lebih efektif dan efisien.

Selain sistem pemerintahan yang diubah menjadi Desentralisasi, *good governace* juga menjadi acuan sistem penyelenggaraan negara saat ini dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka pengelolaan yang dilakukan harus bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program, terutama terkait keuangan. Saat ini desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

Pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa diperlukan untuk penyelenggaraan pembangunan desa. Pembiayaan atau Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kepada desa tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri atau pimpinan lembaga terkait. Masyarakat selalu menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan, kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi. Tuntutan ini diarahkan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Pemerintah Daerah saat ini mengelola dana yang bersumber dari APBN, yaitu Dana Desa (DD).

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan

tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan

dan potensi desa yang bersangkutan. Besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, sebagaimana di maksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 nomor 47 tahun 2015 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Di dalam penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga penerapan dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak dan kewajibannya di dalam mengelola potensi yang dimilikinya dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi. .

Menurut Mahmudi (2015: 224) transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara luas (Sujarweni, 2015: 29).Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi

dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh *agent* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti ingin mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, dan Desa Pandan Arang Ilir pada Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat. Alasan peneliti memilih ketiga desa tersebut tertuang dalam Tabel I.1 berikut

**Tabel I.1**  
**Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Tebat**  
**Kabupaten Lahat**

NO	Desa	ADD Tahun 2018 (Dalam Rupiah)	Realisasi
1	Tanjung Menang	<b>1.421.003.000</b>	<b>1.458.003.000</b>
2	Air Dingin Lama	<b>1.084.961.500</b>	<b>1.084.961.500</b>
3	Pandan Arang Ilir	<b>1.098.363.000</b>	<b>1.118.196.000</b>
Jumlah		<b>3.604.327.500</b>	<b>3.661.160.500</b>

*Sumber: Badan Kepegawaian Kecamatan Tanjung Tebat, 2019*

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, dan Desa Pandan Arang Ilir yang mendapat ADD tertinggi di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat.

Berdasarkan Tabel I.1 dana desa pada 3 desa yang ada di Kecamatan Tanjung Tebat yaitu desa Tanjung Menang, Air Dingin Lama dan Pandan

Arang Ilir. Berdasarkan observasi dan wawancara tentang transparansi, kenyataannya ketiga desa ini belum mewujudkan sistem keterbukaan dan kejujuran antar perangkat desa dan masyarakat. Hal ini terlihat dari tidak ada papan informasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa. Alokasi dana desa yang diberikan pemerintah desa belum bisa menyentuh keseluruhan masyarakat yang ada di ketiga desa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi yang ada, seperti pada laporan pendapatan dan belanja desa di desa Tanjung Menang terdapat anggaran kegiatan pembangunan sarana air bersih tetapi kenyataannya sama sekali tidak ada pembangunan tersebut, dalam hal ini perencanaan program kegiatan tidak berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada. Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas.

Akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan atau musyawarah rencana pembangunan desa. Pada tahap perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat belum dialokasikan ADD, sehingga dari 4 bidang anggaran ADD yang terealisasi sebesar 75%. Pada tahap pelaksanaan sesuai dengan peraturan pemendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi penerimaan dan pengeluaran desa dan didukung oleh bukti

yang lengkap dan sah, sedangkan di ketiga desa tersebut tidak ada papan informasi yang dipasang di lokasi kegiatan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dihadapi pemerintahan desa di kecamatan Tanjung Tebat tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelohan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Studi Kasus pada Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, dan Desa Pandan Arang Ilir).**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah: Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2018 pada Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, dan Desa Pandan Arang Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2018 pada Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, dan Desa Pandan Arang Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penyebab tidak Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, dan Desa Pandan Arang Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyebab salah satu bahan masukan dan bahan pemikiran mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, dan Desa Pandan Arang Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pertimbangan bagi pihak lain yang berkepentingan untuk menjadi bahan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Made wiradarma setiawan. 2017. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). Jurnal S1 Ak, (online), (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/.../6464>. diakses tahun 2017).
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik edisi kedua*. Penerbit UPP STIN YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan.Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Putu Andi Suarjaya putra. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Jurnal S1 Ak, (online), (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/.../7769>, diakses tahun 2017).
- Rizal. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Al-Iqtishad, (online), (<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/5457>, diakses tahun 2018).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit PT Alfabet. Bandung
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit paper plane. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 47 Tahun 2015. *Desa*
- Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 60 Tahun 2014. *Dana Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. *Desa*
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan desa*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah.*

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara.*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. *Pembendaharaan Negara.*

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.  
*Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.*